

KARYA ILMIAH
PERKEMBANGAN MORAL JUDGEMENT PADA REMAJA
SISWA-SISWI KELAS UNGGULAN DAN NON UNGGULAN

OLEH :

Suryani Hardjo, S.Psi.
Staf Pengajar Fakultas Psikologi
Universitas Medan Area



FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2002



KARYA ILMIAH

**PERKEMBANGAN MORAL JUDGEMENT PADA REMAJA
SISWA-SISWI KELAS UNGGULAN DAN NON UNGGULAN**

OLEH :

**Suryani Hardjo, S.Psi.
Staf Pengajar Fakultas Psikologi
Universitas Medan Area**



**FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2002**

KATA PENGANTAR

Kehadirat Allah SWT jualah penulis memanjatkan puji syukur atas limpahan taufik dan hidayahNya, sehingga karya ilmiah yang berjudul : “Perkembangan Moral Judgment Pada Remaja Siswa-Siswi Kelas Unggulan dan Non Unggulan” dapat selesai dengan baik.

Tidak sedikit bantuan dari orang-orang terdekat. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

- Asih Menanti
- Adnan Harahap
- M. Reza Admy Pratama
- Shafisiyah Adya Larasati
- Semua pihak yang terlibat dalam penulisan ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu namaya.

Tentunya karya ilmiah ini belum cukup sempurna. Oleh karenanya kritik dan saran sangat penulis harapkan dari para pembaca sekalian. Akhirnya semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua, setidaknya bermanfaat bagi peneliti sendiri.

Medan, Juli 2002

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
BAB II LANDASAN TEORI	
1. Pendekatan Perkembangan Moral	9
2. Konsep Moral Judgment	17
3. Tingkatan Moral Judgment	21
4. Tahap-Tahap Moral Judgment	24
5. Proses Peningkatan Moral Judgment	39
6. Perkembangan Moral Judgment Pada Siswa SMU	55
DAFTAR PUSTAKAN	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan manusia dapat berlangsung secara alamiah namun perkembangan seperti ini tidak akan menghasilkan perkembangan yang optimal. Diperlukan adanya usaha-usaha lebih lanjut yang dilakukan oleh individu itu sendiri maupun oleh lingkungan, walaupun hal ini belum dapat menjamin terjadinya optimalisasi perkembangan. Kita hanya dapat berharap bahwa batas minimalnya upaya yang dilakukan akan memperlancar proses perkembangan dan mengurangi keterhambatan yang disebabkan oleh karena kurangnya stimulasi.

Demikian pula halnya dengan perkembangan moral judgment sebagai salah satu aspek perkembangan yang krusial di dalam diri manusia, memerlukan pemikiran dan program yang akan memperlancar perkembangannya.

Berkaitan dengan upaya-upaya pengembangan individu di dalam keseluruhan aspek perkembangannya, di Indonesia berbagai upaya pengembangan tersebut harus mengacu kepada nilai sentral bangsa Indonesia yang dirumuskan di dalam tujuan pendidikan nasional, yaitu

untuk menciptakan manusia yang utuh, yang seimbang, meliputi keutuhan dan keseimbangan dalam perkembangan jasmani dan rohani dan didalam perkembangan aspek intelektual, sosial, emosional, serta moral.

Perkembangan aspek-aspek tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain, namun di dalam program pengembangannya dapat dititik beratkan pada aspek tertentu. Pengembangannya diperoleh dari berbagai sumber seperti bahan bacaan, pengalaman, pendidik, dan aktivitas-aktivitas interaksi sosial. Berbeda dari pengembangan aspek intelektual, aspek sosial, emosional, dan moral, lebih banyak memerlukan pengalaman-pengalaman hidup sosial yang kaya dan bervariasi sehingga secara bertahap membawa individu pada kematangan.

Atas dasar pandangan bahwa pengembangan diri individu harus dilakukan secara seimbangan, pada dekade belakangan ini ada kesenjangan, yakni munculnya kecenderungan banyak orang tua atau orang dewasa lainnya yang lebih memfokuskan pengembangan anak pada aspek intelektual sehingga pengembangan aspek sosial, emosional, dan moral, kurang memadai. Sebagai contoh, anak banyak didorong dan diarahkan mengikuti pengajaran tambahan pengetahuan matematik, bahasa Inggris, IPA dan ilmu pengetahuan lainnya, namun jarang orang tua membuka

dialog-dialog tentang masalah sosial-moral, memberi balikan (feedback), memberi pelajaran tambahan agama, mengaji atau mendalami kitab suci, menari, melukis, dan kegiatan-kegiatan lain, yang akan mengembangkan kematangan sosial, emosional, dan moral anak. Program-program pengembangan masyarakat juga masih lebih berorientasi kepada pengembangan intelektual walaupun belakangan ini ini sedikit meluas ke bidang seni, namun masih kurang pada bidang moral. Sementara itu pada sisi yang berbeda, banyak para orang tua maupun orang dewasa lainnya berharap agar anak mereka kelak menjadi orang yang matang secara emosional, serta mempunyai perilaku moral yang terpuji, disamping menjadi anak-anak yang pintar secara intelektual. Kondisi yang bertentangan ini sudah tentu akan sulit memenuhi harapan untuk mendapatkan anak atau individu yang mempunyai kemampuan intelektualitas tinggi, matang secara sosial dan emosional, serta mempunyai moralitas yang baik.

Persoalan moral merupakan persoalan klasik yang terus berlangsung sepanjang hidup manusia, bahkan dalam pandangan teleologis pertanggung jawaban moral manusia masih dituntut pada kehidupan post dunia. Para filosof juga sejak dahulu telah membicarakan tentang moral. Seorang filosof yang bernama Sokrater, pada masa hidupnya banyak dikenal masyarakat

Athena terutama pada kalangan muda karena ia dalam memperdalam dan mengajar ilmu menggunakan cara dengan berpetualang dari lorong ke lorong kota. Mengenai moral, Sokrates menerima dan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Menon tentang “kebijakan”. Menon adalah seorang bangsawan Thessalia yang kaya dan masih muda. Ia bertanya tentang apakah kebajikan itu. Sokrates menjawab antara lain dengan memunculkan pertanyaan-pertanyaan : Dapatkah kebajikan itu diajarkan?, Bagaimana memperolehnya ? Apakah aku mengetahui tentang hal itu?, dan seterusnya (Rouse, 1986). Hal ini memperlihatkan bahwa persoalan moral bukanlah persoalan yang mudah dan ia akan muncul terus mengikuti kehidupan manusia, serta kerap kali menimbulkan kekhawatiran yang mendalam karena pengingkaran-pengingkaran atas moral.

Kuantitas dan kualitas penyimpanan, pelanggaran moral sehingga menimbulkan kesejangan. Khusus kesenjangan moralitas yang terjadi pada remaja, baik yang terjadi dilingkungan keluarga, sekolah maupun di lingkungan masyarakat, telah mengundang keprihatinan. Tidak jarang ditemukan perilaku-perilaku bukan sekedar kenakalan remaja, melainkan sudah dalam bentuk tindakan kejahatan (kriminal). Kenakalan dan kejahatan yang sering muncul dapat dalam bentuk pelanggaran etika sosial sehari-hari

dalam berbahasa, berpakaian; pelanggaran disiplin; cabut sekolah; merusak fasilitas umum; merokok dan menggunakan obat-obat terlarang; pergaulan antar jenis kelamin yang melewati batas; perkelahian kelompok dan massal; mencuri; merampok; dan menodong, dan sebagainya.

Disamping berbagai perbuatan negatif tersebut, kerap terdengar remaja menggunakan alasan atau pertimbangan moral (moral judgment) yang kekanak-kanakan, egosentris, dan egois. Mereka kurang menunjukkan kematangan moral judgment sesuai dengan tingkat usianya. Hal ini antara lain tergambar dari ungkapan kata-kata remaja sehari-hari seperti “Untuk apa pusing-pusing belajar, soal masa depan ada bokap dan nyokap”, “Memangnya mikirin kamu”, “Pikirkan saja diri masing-masing”, “Tidak usah menjadi pahlawan”. Ungkapan-ungkapan ini bukan gambaran intelektual yang rendah melainkan gambaran kecenderungan moral judgment yang lebih rendah dari perkembangan moral judgment yang seyogyanya dicapai oleh mereka. Sesuai dengan perkembangan kemampuan berpikir mereka (remaja) yang pada umumnya mencapai taraf “formal operation”, seharusnya mereka menggunakan kecerdasan intelektualnya untuk menelaah masalah-masalah moral secara kritis dan matang. Tuntutan ini menjadi lebih kuat mengingat bahwa “tingkah laku moral yang

sesungguhnya timbul pada masa remaja”. (Haditono dan kawan-kawan, 1984 : 256) dan bahwa “pada masa remaja diharapkan adanya moral yang otonom” (Haditono, 1984 : 256). Dengan demikian adanya gambaran moral judgment remaja yang kurang sesuai dengan tingkat usia dan perkembangan mereka ini merupakan titik penting untuk mengantisipasi dan mencari solusi atas problem-problem moral remaja. Dibutuhkan adanya pembinaan yang lebih sungguh-sungguh, terlebih lagi karena remaja merupakan bagian generasi muda yang akan berperan sebagai penerus pembangunan bangsa.

Kesenjangan-kesenjangan moral yang terjadi cukup mencolok sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya menimbulkan pertanyaan : “sejauhmana orang tua di rumah, para pendidik di sekolah dan di lingkungan pendidikan lainnya berperan dalam pembinaan moral remaja”. Lebih operasional “sejauhmana para pendidik ini memberikan stimulasi-stimulasi perkembangan moral”. Kohlberg mengatakan “Moral development depend upon stimulation on” (in Lickona, 1976 : 49). Bila diarahkan ke sekolah, maka “sejauhmana para guru, konselor, dan sivitas sekolah lainnya, menciptakan situasi “stimulasi” ini.

Stimulasi moral judgment ditemukan didalam situasi-situasi interaksi sosial yang bervariasi. Dengan demikian, bila individu kurang mempunyai

kesempatan berinteraksi dalam situasi seperti ini maka perkembangan moral judgmentnya tidak berjalan lancar atau mungkin terhambat. Konsep (pendidikan) ini penting dipelajari dari sisi aplikasinya dalam kebijakan sekolah yang mengategorikan siswa sebagai “siswa unggulan dan non unggulan” yang telah banyak diterapkan di sekolah-sekolah saat ini.

Dibandingkan dengan siswa non unggulan, siswa unggulan mempunyai karakteristik tertentu, yaitu : 1. Lebih dibebani dan / atau terbebani oleh tuntutan berprestasi tinggi sehingga dapat membuat perhatian mereka sangat terfokus kepada pengembangan aspek intelektualitas (pengembangan pengetahuan) daripada aspek-aspek lain; 2. Lebih terbatas melakukan aktivitas interaksi sosial sehingga kesempatan pengembangan moral judgment lebih kecil; 3. Terbebani oleh kekhawatiran dan kecemasan yang dapat turun menjadi siswa kelas non unggulan; 4. Lebih menjadi pusat perhatian sehingga membatasi gerak gerik mereka; 5. Lebih dituntut menjadi model yang positif sehingga adakalanya hal ini menjadi tekanan; 6. Dipandang lebih mempunyai hubungan tali kasih (pacaran) dengan siswa kelas non unggulan. Dari karakteristik-karakteristik yang dimiliki oleh siswa unggulan ini dapat diambil kesimpulan bahwa peluang mereka untuk berinteraksi dalam situasi variatif lebih terbatas dari pada siswa non

unggulan. Namun belum diketahui apakah hal ini secara signifikan berkorelasi, atau lebih kuat lagi akan membedakan kematangan moral judgment mereka dibandingkan dengan siswa non unggulan, mengingat bahwa meskipun siswa unggulan mempunyai karakteristik khusus tersebut, hal ini tidak selalu mengurangi perhatian dan distribusi waktu mereka untuk melakukan interaksi sosial yang kaya dan bervariasi; dan jika siswa unggulan mempunyai taraf kecerdasan (inteligensi) yang relatif sama dengan taraf kecerdasan siswa non unggulan. Kecerdasan mengandung unsur kemampuan berpikir, dan kemampuan berpikir ini merupakan prasyarat bagi pencapaian moral judgment pada tahap tertentu (Haditono, 1984).

BAB II

LANDASAN TEORI

Dalam tinjauan landasan teori ini dikemukakan dua pokok besar, yaitu : A. Kerangka teori; dan B. Hipotesis penelitian. Penyajian kerangka teori meliputi : 1. Teori perkembangan moral judgment, memaparkan tentang : a. Pendekatan (teori) perkembangan moral dan acuan teori yang dipilih, b. Konsep moral judgment, c. Tingkatan dan tahapan moral judgment, d. Proses peningkatan moral judgment; 2. Konsepsi inteligensi serta hubungannya dengan kemampuan berpikir dan perkembangan moral judgment; 3. Perkembangan moral judgment siswa SMU; 4. Peran sebagai siswa unggulan dan non unggulan serta peluangnya dalam perkembangan moral judgment.

A. Kerangka Teori

1. Teori Perkembangan Moral Judgment

1. Pendekatan (Teori) Perkembangan Moral dan Acuan Teori yang Dipilih

Aronfreed (1976), Kohlberg (1976) di dalam Lickona (1976) mengemukakan bahwa ada tiga pendekatan (teori) yang dapat digunakan

untuk memahami perkembangan moral manusia, yaitu teori psikoanalisa, teori behavioristik, dan teori kognitif. Teori psikoanalisa dan teori behaviorisme mempunyai kesamaan dalam hal mempelajari moral dari segi "isi" (content) moral, sedangkan teori kognitif sangat berbeda karena teori ini mengkaji moral dari segi "struktur" moral. Fokus kajian yang sangat berbeda ini merupakan perbedaan yang mendasar antara teori psikoanalisa dan behaviorisme disatu sisi dengan teori kognitif disisi lainnya.

Teori psikoanalisa Freud mengemukakan tiga sistem dinamis yang mempengaruhi kepribadian manusia, yaitu das es (the id), das ich (the ego), dan das ueber ich (the super ego) (Suryabrata, 1990). The id merupakan aspek biologis yang dibawa sejak lahir, seperti instink-instink yang selalu menuntut pemuasan. The id merupakan dunia subyektif (batin), artinya ia hanya dapat memenuhi kebutuhannya hanya pada alam subyektif (tidak nyata). Misalnya bila seseorang lapar maka ia hanya bisa membayangkan makanan tetapi tidak dapat memperoleh makanan tersebut. Prinsip kerja the id adalah mencari kenikmatan. The ego merupakan aspek psikologis kepribadian yang berfungsi menghubungkan dunia subyektif menjadi realita. Dalam contoh di atas dapat diterangkan bahwa orang lapar yang membayangkan makanan dilanjutkan dengan rencana dimana mendapatkan

makanan, lalu pergi ke tempat itu untuk mengetahui apakah makanan tersebut dapat diperoleh. The super ego merupakan aspek eksekutif dan sosiologis kepribadian, berisi nilai-nilai serta cita-cita masyarakat. The super ego berfungsi mengontrol apakah jalan yang ditempuh oleh the ego sesuai dengan harapan moral masyarakat atau tidak. Disini the super ego mengontrol cara yang ditempuh dalam memenuhi kebutuhan, dan memilih kebutuhan mana yang boleh atau tidak boleh, salah atau benar, pantas atau tidak pantas, dalam upaya memenuhinya. Dengan demikian the super ego merupakan aspek moral kepribadian. Suryabrata (1990:149) mengemukakan fungsi utama super ego sebagai berikut :

- “1) merintangi impuls-impuls das Es, terutama impuls-impuls seksual dan argresif yang pernyataannya sangat ditentang oleh masyarakat;
- 2) mendorong das Ich untul lebih mengejar hal-hal yang moralistis daripada yang realitis;
- 3) mengejar kesempurnaan”.

Menurut teori psikoanalisa, moral berkembang melalui proses internalisasi nilai-nilai. Aturan-aturan yang diajarkan dan larangan-larangan. Dalam pandangan psikoanalisa, perkembangan moral terjadi apabila individu makin mampu menginternalisasikan nilai-nilai dan aturan-aturan yang direkomendasi oleh masyarakat ke dalam dirinya dan semakin mampu menghindarkan diri dari nilai-nilai dan aturan-aturan yang tidak

dibenarkan oleh masyarakat. Dengan demikian, orang yang bermoral tinggi adalah orang yang semakin mampu menyerap dan menerapkan nilai dan aturan masyarakat di dalam kehidupannya.

Teori perkembangan moral behaviorisme mempunyai pandangan yang sama dengan teori psikoanalisa tentang terjadinya perkembangan moral yakni melalui proses internalisasi isi moral. Perbedaan keduanya terletak pada cara yang digunakan. Jika pada teori psikoanalisa melalui "ajaran langsung", maka teori behaviorisme melalui pembentukan "asosiasi" stimulus-respons. Dalam teori behaviorisme tingkah laku bermoral dibentuk dengan memberikan ganjaran (reward) dan perilaku yang hendak dihilangkan dihapus dengan memberikan hukuman (punishment).

Teori perkembangan moral kognitif tidak mengkaji perkembangan moral dari "isi" (content) moral, melainkan kepada penggunaan dan pemilihan "pertimbangan-pertimbangan" moral atau "alasan-alasan" moral (moral judgment) yang digunakan oleh individu di dalam memutuskan masalah-masalah moral. Suatu tahapan moral judgment tertentu menggambarkan "struktur" berpikir moral tertentu. Disini, apakah individu dominan menggunakan struktur pertimbangan moral (moral judgment) tahap 1, 2, 3, 4, 5, atau tahap 6. Tahapan moral judgment yang lebih tinggi

merupakan pertimbangan-pertimbangan moral yang terstruktur dari nilai-nilai moral yang berlaku untuk kepentingan kelompok yang lebih besar dan lebih universal. Dalam pandangan teori kognitif, individu yang matang moral judgmentnya adalah individu yang didalam memutuskan masalah-masalah sosial-moral menggunakan standrad nilai-nilai yang lebih luas dan universal, bukan sebaliknya bergantung kepada nilai-nilai pemilik otoritas, nilai-nilai diri sendiri atau bersandar kepada kepentingan kelompok tertentu yang lebih kecil.

Sesuai dengan perbedaan utama teori kognitif dari teori psikoanalisa dan teori behaviorisme, yakni penitik beratan kajian teori kognitif pada struktur berpikir moral, sedangkan teori behaviorisme dan teori psikoanalisa pada isi atau perilaku, hal ini membatasi dengan tegas bahwa ruang lingkup teori kognitif terbatas pada pengkajian “tingkah laku tertutup” (convert behavior), tidak meliputi sampai kepada tingkah laku nyata (action). Sedangkan ruang lingkup teori behaviorisme dan teori psikoanalisa terbatas hanya pada “tingkah laku yang nampak” (convert behavior) saja, tidak mempersoalkan pikiran yang mendasari perilaku.

Teori perkembangan moral kognitif mempunyai asumsi-asumsi umum, yang akan memperjelaskan perbedaannya dari dua teori

perkembangan moral lainnya. Kohlberg (didalam lickona, 1976 : 48)

mengemukakan asumsi-asumsi tersebut sebagai berikut :

- “1) Moral development has a basic connitive-stuctural or moral judgmental component.
- 2) The basic motivation for morality is ageneralized motivation for acceptance, competence, self-esteem, or self-realization, rather than for meeting biological needs and reducing anciey or fear.
- 3) Major aspects of moral development are culturally universal, because all cultures have common sources of social interation, role taking, and social conflict, which require moral integration.
- 4) Basic moral norms and principles are structures arising through experiences of social interaction, rather through internalized rules, but by structures of interaction between the self and other.
- 5) Environmental influences in moral development are defined by the general quality and extent of cognitive and social stimulation throughout the chlid’s development, rather than by spesific experiences with parents or experiences with parents or experiences of discipline, punishment, and reward”.

Dari kutipan tersebut dapat dijelaskan bahwa teori perkembangan moral dalam orientasi kognitif mempunyai suatu truktur kognitif. Struktur kognitif ini merupakan gambaran tahap pencapaian moral judgment seseorang, yang dapat dilihat dari pertimbangan didalam menggambil suatu keputusan moral. Tahap moral judgment yang lebih rendah menunjukkan kemampuan berfikir moral yang lebih sederhana, berorientasi pada pemilik otoritas atau diri sendiri. Sebaliknya tahap moral judgment yang lebih tinggi menunjukkan kemampuan menerima, menghargai dan mengatualisasikan diri sendiri menjadi moralitas yang matang, bukan mengarah kepada

pemenuhan kebutuhan-kebutuhan biologis dan menghilangkan perasaan-perasaan cemas dan takut. Tampak bahwa arah perkembangan moral dalam teori kognitif berada pada tingkat nilai yang lebih tinggi seperti didasari oleh nilai-nilai saling menghargai, yang akan lebih menjangkau nilai-nilai kemanusiaan dari pada nilai-nilai vegetatif atau animal yang lebih rendah yang mengarah kepada kebutuhan biologis. Dorongan harga diri dan aktualisasi diri mengandung makna implisit bahwa proses perkembangan moral yang terjadi pada seseorang datang dari dalam diri sendiri, bukan lebih tergantung pada banyaknya intervensi lingkungan. Hanya berperan sebagai fasilitator dan stimulator.

Ketersediaan situasi yang memungkinkan perkembangan moral dalam acuan teori kognitif bersifat universal, tidak dibatasi oleh perbedaan budaya, oleh karena setiap masyarakat dengan isi budaya yang berbeda-beda tetap mengandung situasi-situasi yang akan mengembangkan moral judgment, yakni situasi "interaksi sosial" antara satu individu lainnya. Keterlibatan individu di dalam interaksi sosial akan mengembangkan kemampuan alih peran (role taking) dan konflik sosial (social conflict). Kemampuan alih peran dan pengalaman konflik sosial moral yang kaya, merupakan dasar perkembangan moral judgment. Dengan

demikian, orientasi teori kognitif memandang bahwa perkembangan moral bukan hasil dari internalisasi aturan-aturan eksternal seperti cara-cara pendisiplinan melalui hubungan stimulus respons, melainkan tergantung pada kualitas stimulasi kognitif, hasil dari interaksi sosial individu dengan lingkungannya.

Atas dasar karakteristik ketiga teori perkembangan moral yang telah dikemukakan, maka teori yang dipilih dalam penelitian ini adalah “teori perkembangan moral kognitif”. Tokoh yang sangat dikenal didalam teori kognitif adalah piaget. Piaget banyak pembahas tentang inteligensi dan moral judgment. Tokoh lain yang berada dalam satu kerangka teori perkembangan kognitif yang membahas tentang moral judgment adalah kohlberg. Arbuthnot dan faust (1981: 46) mengatakan “kohlberg’s research approach and theoretical orientation are quite similar to Piaget’s. Both have cognitive-developmental theories”.

Penelitian ini mengacu kepada teori perkembangan kognitif dan teori perkembangan moral judgment Kohlberg. Pilihan ini berdasarkan atas beberapa pertimbangan. Pertama, teori perkembangan kognitif telah diuji dalam berbagai kondisi sosial budaya, demikian pula dengan keenam tahap moral judgment Teori perkembangan moral judgment Kohlberg yang

mengacu kepada teori kepada kognitif disusun dari penelitian-penelitian cross-cultural di dalam beberapa negara, studi-studi eksperimental dalam mempercepat perkembangan tahap moral judgment didalam penyelidikan-penyelidikan logitudinal (Liebert dan kawan-kawan, 1979). Kedua, teori perkembangan moral kognitif yang mengkaji persolan moral dari sudut “struktur” bukan dari “isi” moral menenpatkan teori ini sebagai teori yang universal, oleh karena seluruh budaya mengandung kondisi yang akan mengembangkan moral judgment. Dengan demikian latar belakang budaya dan sosialisasinya yang berbeda dari sasaran penelitian ini dapat diatasi.

Dapat disimpulkan bahwa ada tiga pendekatan (teori) dalam psikologi yang dapat digunakan untuk mengkaji perkembangan moral, yaitu teori psikoanalisa, teori behaviorisme, dan teori kognitif. Teori yang diacu dalam penelitian ini adalah teori kognitif.

b. Konsep Moral Judgment

Penyajian pengertian moral judgment penulis awali dari kamus Besar Bahasa Indonesia (2001). Di dalam kamus ini dikemukakan arti “moral” sebagai “baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dsb..... akhlak; budi pekerti; susila.....” (744).

buruk; berakhlak baik; sesuai dengan moral” (755) Di dalam Kamus Filsafat dan Psikologi (1993 : 159) dikemukakan bahwa moral “berhubungan dengan norma-norma perilaku yang baik/benar dan salah menurut keyakinan-keyakinan etis pribadi atau kaidah-kaidah sosial, ajaran mengenai baik perbuatan dan kelakuan”. Chaplin di dalam kamus Lengkap Psikologis (1997 : 308) mengemukakan bahwa moral “1) Menyinggung akhlak, moral, tingkah laku yang susila. 2) Ciri-ciri khas seseorang atau sekelompok orang dengan perilaku pantas atau baik”. Dari pengertian-pengertian moral yang disajikan ini dapat dilihat bahwa moral diartikan sebagai suatu isi (materi) tingkah laku yang sesuai atau tidak sesuai dengan kaidah pribadi dan kaidah-kaidah sosial.

Mengenai pengertian judgment, penalaran, thinking, Chaplin (1997 : 265) mengemukakan sebagai berikut : Judgment merupakan “pendapat, keputusan, pertimbangan. 1) Proses menghubungkan dua atau lebih objek, fakta, atau pengalaman. 2) Satu penilaian kritis mengenai seseorang, situasi, atau benda”. Penalaran adalah “proses berfikir yang mencakup ideasional” (519). Di dalam kamus Filsafat dan psikologi (1993 : 160) dikemukakan bahwa judgment “berhubungan dengan kemampuan seseorang mengambil keputusan dari suatu peristiwa atau tindakan atau kelakuan,.....”. A

Dictionary of Psychologi (1975 : 241) mengemukakan pengertian reasoning sebagai "A process of thinking involving inference, or of solving problems by employing general principles". Pengertian-pengertian diatas menunjukkan bahwa istilah judgment, thinking, maupun reasoning mengandung kegiatan pokok, yakni menalar (berfikir).

Jika pengertian moral dan judgment dipadukan maka moral judgment berarti penalaran/pemikiran/pertimbangan tentang moral. Di dalam literatur-literatur yang membahas tentang "moral judgment". Istilah Moral judgment reasoning, dan moral thinking, digunakan dengan maksud sama.

Kohlberg (dalam Lickona, 1976) menjelaskan bahwa konsep moralitas lebih merupakan sebuah philosophis (ethical) daripada sebagai konsep perilaku. Menurut beliau, hal yang paling esensial dari struktur moralitas adalah "prinsip keadilan" dari inti keadilan adalah "distribusi hak dan kewajiban" yang diatur oleh konsep-konsep "persamaan hak dan hubungan timbal balik". Dengan tegas Kohlberg mengatakan bahwa keadilan bukan aturan konkrit melainkan prinsip. Keadilan (justice) "is not a rule or a set of rules; it is a moral principle" (Kohlberg 1970, in Lickona, 1976 : 5).

Kemudian ia mengatakan :

“By a moral principle we mean a mode of choosing which is universal, a rule of choosing which we want all people to adopt always in all situations..... There are exceptions to rules, then, but no exception to principle. Amoral obligation is an obligation to respect the right or claim of another person. A moral principled is a principle you versus me, you versus a third person. There is only one principle basis for resolving claims : justice or equality”.

Jelas bahwa keadilan sebagai unsur esensial moralitas bukan aturan atau seperangkat aturan, melainkan suatu model memilih yang bersifat universal, yakni aturan memilih yang diinginkan semua orang dan situasi. Jika di dalam aturan moral ada pengecualian, maka didalam prinsip moral tidak ada pengecualian. Prinsip moral mengandung arti tanggung jawab menghargai hak atau tuntutan orang lain, dengan basis penyelesaian yang adil dan sama. Kohlberg (dalam Lickona; 1976 : 5) menandakan bahwa “A moral principled is not only of rule of action but a for action. As a reason for action, justice is called respect for persons”.

Pada akhir paparan pokok bahasan ini dapat disimpulkan bahwa konsep moral judgment sesuai dengan acuan teori perkembangan moral kognitif yang dipilih dapat dirumuskan sebagai sebagai “philosophis”, bukan tindakan atau perilaku. Moral judgment adalah penalaran /pemikiran/ pertimbangan moral yang digunakan oleh seseorang didalam mengambil

keputusan- keputusan moral, yang memfokus kepada “struktur” (bukan isi) moral.

c. Tingkatan Dan Tahapan Moral Judgment

Dalam paparan ini penulis mengemukakan tiga hal, pertama tentang sifat-sifat tahapan di dalam teori perkembangan moral kognitif, kedua tentang tahap-tahap perkembangan moral judgment, dan ketiga tentang persoalan percampuran (mixture), regresi, dan fiksasi dalam moral judgment.

1. Sifat-sifat tahapan di dalam teori perkembangan moral kognitif

Arbuthnot & Faust (1981) mengatakan dalam artikel penting mengenai pendekatan perkembangan kognitif, Kohlberg (1969) meringkas ciri-ciri umum tahap kognitif yang awalnya dikemukakan oleh Piaget (1965). Ada hal utama yang dikemukakan oleh Piaget (1965). Ada empat hal utama yang dikemukakan, yaitu :

“First, the stage notion implies that within each we will be able to observe distinct *qualitative differences* in the way the child solves the same problem at different stages of development

Second, the stages of development that the child passes through follow an *invariant sequence*

Third, each state represents *a structured whole*the child's response reflect the way the child organizes thoughts the structure of his or her reasoning.

Fourth, the stages are *hierarchical integrations*"
(Arbuthnot & Faust, 1981 : 47).

Keempat hal utama tersebut dapat dijelaskan bahwa pertama, dapat dibedakan secara kualitatif cara-cara individu yang berbeda tahap dalam memecahkan masalah yang sama. Perbedaan ini meliputi perbedaan segi kuantitatif dan kualitatifnya. Individu yang memiliki tahap yang lebih tinggi, secara kuantitatif dan kualitatif akan menggunakan lebih banyak. Bila diilustrasikan pada dua jenis bangunan bahwa bangunan pencakar langit menggunakan lebih banyak balok daripada bangunan gubuk. Secara kualitatif, individu yang mempunyai tahapan lebih tinggi akan menggunakan pemikiran yang lebih logis, lebih matang, dan lebih canggih (sophisticated). Dengan demikian, tahapan yang lebih tinggi bukan sekedar penambahan dari tahapan yang lebih rendah. Kedua, perkembangan tahapan dilalui oleh setiap orang dengan urutan tanpa kecuali (yakni tetap), dimulai dari tahap yang lebih rendah menuju tahap yang lebih tinggi secara berurut. Hal yang berbeda adalah percepatan perkembangannya. Ketiga, respon individu pada tahapannya menggambarkan suatu keseluruhan yang berstruktur pikirannya, bukan merupakan hasil keakraban individu terhadap tugas yang dihadapi. Keempat, tahap-tahap merupakan suatu integrasi hierarkhis. Mengandung arti bahwa bagian-bagian yang ada dalam sistem

tersusun dan mampu berkombinasi/mengkombinasi dalam cara-cara yang baru. Tahap yang lebih tinggi akan lebih terdiferensiasi, yakni sistem berpikir lebih banyak bagian-bagiannya, lebih kompleks dan lebih khusus kemampuan-kemampuannya. Analogi diferensiasi dan integrasi dari dunia biologi memperjelaskan konsep ini. Sistem nervous organisma yang lebih rendah seperti amuba adalah lebih sederhana sehingga ia hanya memiliki sedikit fungsi. Sedangkan manusia sebagai organisma tinggi, lebih kompleks dan lebih terdiferensiasi serta mempunyai lebih banyak bagian-bagian khusus yang membentuk fungsi-fungsi unik. Sistem nervous manusia lebih terintegrasi.

Sesuai dengan ini sub pokok bahasan ini, jelas bahwa sifat-sifat tahapan dalam pandangan teori perkembangan moral kognitif mengandung empat ciri utama yaitu pertama, kualitas kemampuan menyelesaikan masalah sosial-moral individu berbeda-beda sesuai dengan tahap kognitif yang dimiliki; kedua; perkembangan tahap berlaku sama untuk setiap individu, yakni dimulai dari tahap yang rendah menuju satu tahap yang lebih tinggi secara berurutan; ketiga; respon individu merefleksikan cara ia mengorganisasikan struktur pikirannya; keempat, tahap-tahap merupakan suatu integrasi hierarehis.

2. Tahap-Tahap Moral Judgment

Dari serangkaian hasil studinya, Kohlberg mengemukakan bahwa ada tiga tingkat (level) moral judgment, dan masing-masing tingkatan terdiri atas dua tahap sehingga keseluruhan ada enam tahap moral judgment. Ketiga tingkatan moral judgment dikemukakan sebagai berikut :

a) Tingkat Preconventional

Tingkat ini dicirikan oleh keyakinan bahwa kebenaran adalah bila mengikuti aturan-aturan konkrit yang didukung oleh penguasa (pemilik otoritas) seperti orang tua, dan adanya hukuman yang mengikuti bila perilaku individu tidak sesuai dengan aturan-aturan yang dituntut oleh pemilik otoritas. Hal yang dianggap benar adalah bila menjauhi hukuman dan menaruh rasa hormat kepada penguasa, melayani minat-minat diri sendiri, dan mendapat menukar hadiah-hadiah. Perspektif sosial pemikiran-pemikiran prakonvensional secara luas memusat di sekitar diri dan dimensi-dimensi fisik atau akibat-akibat aturan-aturan dan perilaku-perilaku yang diterapkan.

b) Tingkatan Conventional

Pada tingkatan conventional, kebenaran diukur dengan adanya konformitas terhadap harapan-harapan agar disebut sebagai berperilaku baik

dari masyarakat yang lebih luas atau kelompok-kelompok yang lebih kecil. Individu berusaha menegakkan aturan-aturan, harapan-harapan, dan peran-peran masyarakat. Pada tingkat ini seseorang bertindak tidak lagi tertuju kepada hukuman atau minat-minat diri sendiri sebagaimana tingkat sebelumnya, tetapi karena motivasi inner untuk apa yang diharapkan oleh masyarakat. Penalaran-penalaran ditujukan pada opini sosial, loyalitas dan penerimaan akan hal-hal yang disetujui oleh orang-orang lain. Jika perspektif sosial sebelumnya bersifat egoistik, maka pada tingkatan conventional ini pandangan-pandangan dan opini-opini ditempatkan pada kelompok yang lebih besar dimana individu yang bersangkutan menjadi anggotanya.

c) Tingkatan Postconventional

Pada tingkatan ini apa yang benar didefenisikan oleh nilai-nilai, hak-hak kemanusiaan yang universal atau prinsip-prinsip yang ditanggung jawab oleh masyarakat dan individu, dijunjung tinggi. Pemikir-pemikir tingkatan ini yakin bahwa kebajikan harus memperhatikan hak-hak seluruh anggota masyarakat dan oleh karenanya nilai-nilai etika moral seseorang valid diterima secara luas, nilai-nilai keadilan harus mendapat jaminan. Orientasi moral pada tahap ini bukan hanya pada peraturan itu semata-mata

(per se) sebagaimana pada tingkatan conventional, tetapi kepada prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan dibelakangnya, yakni individu sadar akan hak-hak dan nilai-nilai yang harus dilindungi. Praktek-praktek sosial harus didasarkan pada moralitas, dari pada memperoleh moralitas dari praktek-praktek sosial. Dengan kata lain, prinsip-prinsip moralitas menjadi acuan moral seseorang bukan seseorang mengacukan atau menyesuaikan moralnya kepada praktek-praktek di masyarakat. Pada level ini nilai-nilai moral terlepas dari kepentingan pada suatu kelompok besar atau kecil, melainkan terikat kepada nilai-nilai moral yang sah, yang bersifat universal dan nilai-nilai tersebut telah diadopsi menjadi milik pribadi.

Ketiga tingkatan tersebut dijabarkan menjadi enam tahap moral judgment sebagai berikut :

a) Tingkatan Preconventional :

Tahap 1 : Moralitas heteronomous

Orientasi moral pada tahap ini kepada hukuman fisik dan kepatuhan. Pada tahap ini anak lebih dipengaruhi oleh akibat-akibat fisik dari pada akibat-akibat psikologis atas tindakannya yang diterimannya dari orang lain.

Kepatuhan dinilai untuk kepentingan dirinya sendiri. Pikirkan pada tahap ini sangat egosentrik, yakni anak tidak dapat menimbangakan perspektif individu-individu lain, dan tidak mengakui bahwa pandangan dan interest (minat) orang lain berbeda dari pandangan dan interestnya sendiri.

Hukuman dalam pemikiran tahap satu merupakan hukum keadilan yang berlaku seperti “mata diganti/untuk mata, dan juga untuk gigi”. Tahap ini tidak menilai aturan-aturan sebagai pemahaman atas hal apa yang diinginkan dari suatu perilaku, tetapi hanya sebagai tanda-tanda (signals) pada anak sebagai jenis-jenis perilaku yang akan menyakitkan atau menyenangkan. Aturan-aturan tentang perilaku benar-salah tidak dipandang mempunyai hubungan dengan masyarakat yang lebih luas. Dalam sehari-harinya konsepsi tentang masyarakat tidak ada, ia hanya mengidentifikasi kelompok sosial terbatas pada keluarga. Hal ini tidak berarti bahwa anak-anak dengan tahap moral judgment tahap satu kurang mempunyai kesadaran sosial. Tingkatkan kesadaran sosial dibatasi oleh penerimaan kepada orang lain sebagai sumber-sumber hukuman atau ganjaran, dalam arti bahwa orang-orang dewasa adalah lebih besar, lebih kuat, lebih tahu, dan dapat mengontrol opini-opini perilaku anak.

Ciri konsepsi berpikir moral tahap satu berdasarkan pada tekanan-
tekanan eksternal dan tanpa suatu pemahaman tentang keadilan atau
kejujuran. Kebenaran pada tahap satu dikonsepsi dengan membuat
kesamaan dengan pemilik kekuasaan (pemilik otoritas) dan menjauhi
pembungkaman.

Tahap 2 : Individualisme, tujuan instrumental dan pertukaran.

Tahap ini berkenaan dengan tahap menggunakan kenikmatan, anak
menyartikan kebaikan adalah hal-hal yang menghasilkan kesenangan,
pelayanan-pelayanan, kekuasaan, dan lain-lain. Untuk diri sendiri, apa yang
dianggap benar adalah yang melayani kebutuhan dan keinginan diri sendiri
atau orang lain. Disini berlaku moral jual beli. Sesuatu yang dianggap benar
jika kedua belah pihak melakukan atau memperoleh hal yang sama.

Ada beberapa perbedaan tahap dua dari tahap satu. Pertama, anak
mulai dapat membedakan kebutuhan dan keinginan orang lain yang berbeda
dari kebutuhan dan keinginan dirinya. Pada tahap satu anak hanya dapat
melihat perspektif, kebutuhan, dan keinginan dirinya sendiri. Kedua,
moralitas anak mulai secara internal, sedangkan pada tahap satu moralitas
dipelajari dari standart-standart moral orang lain. Pada tahap dua seseorang

mulai menilai kebenaran berdasar pada nilai-nilai yang terkandung dari
UNIVERSITAS MEDAN AREA

suatu tindakan yang memuaskan dirinya sendiri. Artinya bahwa pada tahap ini individu dapat menerima bahwa orang lain mempunyai kebutuhan-kebutuhannya sendiri dan berpikir bahwa ada pertukaran interest diri sendiri dengan orang lain. Disini hubungan timbal balik sangat pragmatis. Misalnya anak berpikir bahwa “engkau menggaruk punggungku, aku menggaruk punggungmu”. Ketiga, pada tahap dua ini masih ada ciri-ciri egoisme. Perilaku dianggap baik hanya jika mempunyai konsekuensi positif terhadap tokoh (anak yang bersangkutan). Kebenaran didefinisikan sebagai nilai instrumental yang memberi kesenangan pada diri sendiri dan orang lain, bukan berdasarkan kepada pemahaman akan tanggung jawab atau penghargaan yang timbal balik. Keempat, pemikir pada tahap dua lebih sensitif pada ukuran kebenaran orang lain yang didasarkan kepada perspektif sosial yang lebih (dari tahap satu) dan lebih memfokus kepada maksud-maksud tokoh. Hal ini merupakan gambaran menuju tahap tiga.

b) Tingkat conventional :

Tahap 3 : Harapan-harapan interpersonal bersama, hubungan-hubungan, dan konformitas interpersonal.

Moralitas tahap ini mengacu kepada hubungan interpersonal untuk memperoleh sebagai anak baik (good boy-nice girl). Disini individu

berusaha memenuhi harapan-harapan orang lain dengan melakukan sesuatu agar disebut sebaik orang yang baik atau disetujui orang lain, sesuai dengan tuntutan-tuntutan peran, dan loyal kepada kelompok dimana ia menjadi bagian. Individu pada tahap ini mengangungkan etika aturan tetapi belum mempunyai kesadaran pada persetujuan-persetujuan dan harapan-harapan bersama, dari perspektif-perspektif dan perasaan-perasaan seseorang atau orang-orang lain, dan lebih mementingkan interest kelompok sosial dibandingkan interest sendiri.

Motivasi moral pada tahap ini memelihara hubungan interpersonal diantara anggota-anggota kelompok. Menurut selma, 1971, (dalam Arbuthnor & Faust, 1981) pemikiran bahwa tindakan menyimpang terhadap suatu hubungan interpersonal yang baik dapat dimaafkan. Seperti dalam kasus tindakan mencuri, merampok, dapat dimaafkan apabila tindakan tersebut dilakukan untuk menolong nyawa hidup orang yang sangat dicintai yang berada dalam keadaan kritis. Hal ini menunjukkan adanya kemampuan alih peran. Selman (1971) mengatakan "when this ability is acquired (role taking-penulis), the individual is capable of stage 3 thought (dalam Arbuthnor & Faut, 1981 : 59).

Pemikir-pemikir tahap tiga akan menilai tindakan apakah sebagai suatu moral yang buruk dari persetujuan orang lain. Untuk ini seseorang harus mempunyai kemampuan mengantisipasi hal-hal yang disetujui atau tidak disetujui oleh orang lain. Mereka selalu melakukan antisipasi sehubungan dengan persetujuan dengan hal-hal yang dapat menimbulkan kemurkaan. Sifat-sifat egois ditransformasi kepada pemerolehan persetujuan, walaupun sifat-sifat egois tersebut belum hilang sama sekali.

Tahap 4 : Sistem sosial dan hati nurani

Pada tahap ini orientasi moral kepada pemeliharaan aturan atau keteraturan dan hukum. Kebenaran didefinisikan sebagai orang yang menegakkan tugas-tugas di dalam masyarakat dan mencapai keteraturan sosial sebagai suatu keseluruhan, atau sebagai cara, bukan kata hati (conscience). Pada tahap empat ini individu membangun komitmen-komitmen dan tanggung jawab-tanggung jawab memelihara keteraturan sosial dan menghargai diri sendiri. Menurut pemikir-pemikir tahap empat kepemilikan harus mendapat legitimasi, dan secara sosial harus disetujui.

Individu-individu tahap empat menekankan pentingnya mengikuti aturan-aturan dan mengekspresikan kemarahan seseorang mengganggu hak-hak atau hak milik. Menurut individu tahap empat ini, tanpa suatu standard

hukum-hukum maka perilaku manusia akan kacau dan kaos (chaos). Seluruh anggota masyarakat harus kekal (tetap) dengan aturan-aturan dan hukum-hukum yang dipelihara masyarakat. Menurut mereka, loyalitas dan hubungan personal seperti pada tahap tiga tidak cukup memelihara kejujuran dan keteraturan. Pemikir-pemikir tahap empat mengambil pandangan yang lebih abstrak tentang hukum dan mencar jaminan tentang interaksi-interaksi kesentosaan, ketenangan, dan hak-hak orang. Mereka lebih keras menegakkan hukum dalam usaha memelihara aturan dengan tidak melakukan tindakan memilih kasih. Pada tahap empat ini loyalitas pada hukum bukan pada orang.

Tahap empat berorientasi pada penerimaan pandangan yang legal tentang apa yang benar dan baik. Hukum-hukum diketahui oleh wakil-wakil masyarakat. Jika individu tahap empat berkembang terus, yang disebut oleh Kohlberg sebagai tahap 4B, mereka mengakui bahwa hukum-hukum datang dari orang selalu memiliki interest yang tetap di dalam hukum. Mereka ini mempertanyakan hukum mana yang menjadi pembimbing perilaku? Siapa pemilik otoritas dan siapa harus ditentukan? Pemikir tahap 4B, mengajukan pertanyaan-pertanyaan dibelakang formasi hukum yang membimbing kita. Menurut mereka : 1) Hukum-hukum harus didasarkan atas kebaikan umum;

2) Hukum-hukum harus didasarkan atau aturan mayoritas; 3) Hukum-hukum harus didasari atas hukum-hukum moral.

Secara esensial perbedaan antara pemikir-pemikir tahap 4A, 4B adalah rigiditas kejujuran dan penggolongan aplikasi-aplikasi hukum. Misalnya pada tahap 4A mana yang adil, yang dapat atau tidak dapat dibuat oleh seseorang kemudian mencari daftarnya sedangkan pada tahap 4B mencari prinsip-prinsip yang teratur dibelakang hukum-hukum. Disini hukum harus menggambarkan aturan-aturan umum perilaku. Pikiran-pikiran bahwa hukum harus menggambarkan prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran, menghubungkan tahap empat moralitas konvensional ke tahap lima moralitas yang prinsip.

c) Tingkat Postconventional :

Tahap 5 : Kontak sosial, atau kegunaan dan hak-hak individu.

Apa yang dianggap benar pada ini adalah menegakkan hak-hak, nilai-nilai dasar, dan persetujuan secara timbal balik atas kerja sama masyarakat, walaupun menimbulkan konflik dengan hukum-hukum dan aturan-aturan tertentu dari kelompok sosial. Individu pada tahap ini mengakui bahwa hukum-hukum relatif ada dalam konteks kelompok satu group, dan harus ditegakkan karena mereka basis dari suatu kontrak sosial (yang harus

dipelihara dari suatu prinsip). Pada waktu yang sama, nilai-nilai atau kebenaran-kebenaran non relatif (absolut) seperti hak-hak untuk hidup dan kemerdekaan, harus ditegakkan tanpa memperhatikan pendapat publik atau keinginan masyarakat. Pemikir-pemikir tahap lima menempatkan tinggi nilai pada saling percaya dan menghargai/menghormati, karena hal ini melindungi hak-hak diri sendiri dan orang-orang lain. Tahap ini juga dicirikan oleh suatu ide kegunaan yang rasional (berbeda dari sifat kegunaan egoistik pada tahap dua) atau keyakinan bahwa hukum-hukum dan defenisi tugas-tugas harus didasarkan pada pelayanan apa yang paling baik untuk yang terbaik dari sejumlah orang. Pemikir-pemikir tahap lima selalu menemukan moral dan aturan-aturan legal menjadi dalam konflik, dan sudah sulit merekonsiliasi (mendamaikan)nya.

Pada tahap lima ini individu berorientasi pada memaksimalkan kesejahteraan masyarakat dan kepada menghargai kecenderungan mayoritas, pada saat melindungi hak minoritas. Ini tidak keluar dari suatu rasa hormat kepada kekuasaan atau otoritas dari kelompok lebih besar, tetapi keluar dari kebutuhan menerima tanggung jawab sosial dengan dapat mengharapkan orang-orang lain membuat hal yang sama. Hukum-hukum

kemudian adalah penyusunan (codification) cara-cara orang memilih hidup bersama didalam suatu sistem sosial.

Pergerakan moralitas tahap lima adalah bergerak dari fikiran yang conventional kepada fikiran yang prinsip. Ini berarti apa yang banar tidak diartikan sebagai apa yang conventinal atau yang diakui oleh sentimen publik, melainkan pada universal manusia yang istimewa yang inherent dalam menjadi seorang manusia dan bebas (independent) dari status seseorang dimasyarakat. Keadilan terletak pada kesamaan dan pertimbangan jujur dari seseorang yang tidak mementingkan ciri-ciri personalnya seperti ras, agama, status sosial.

Perbedaan esensial antara pemikir prinsip (tahap lima) dengan tingkat-tingkat sebelumnya adalah bahwa pemikir-pemikir prinsip memahami apa yang disebut "seharusnya". Ini merefleksikan suatu pergerakan tidak hanya pada lebih baik atau lebih meliputi perspektif tentang apa masyarakat adanya seperti dicirikan perkembangan dari tahap sebelumnya, tetapi suatu pergerakan kepada mendasarkan praktek-praktek masyarakat pada teori moral – pada pendasaran hukum-hukum pada prinsip-prinsip abstrak keadilan.

Tahap 6 : prinsip-prinsip etik yang universal.

Pada esensinya tahap ini menghadirkan pemerolehan pendirian etik dari pertimbangan-pertimbangan filosofis teknikal secara tinggi. Belakangan ini dalam teori tidak jelas apakah tahap lima adalah benar secara hierarki berbeda tahap dengan tahap diatas lima, atau hanya suatu akhir dari tahap 5 bentuk 5B. sejak Kohlberg tidak mengacu kepada skor tahap 6, pembaca harus mempertimbangkan tahap 6 sebagai kemajuan tahap 5 dalam seluruh kasus yang mengacu ke tahap 6.

Apa yang benar menurut pemikir tahap 6 diputuskan menurut serangkaian memilih-sendiri prinsip-prinsip yang akan dimaksudkan untuk seluruh kemanusia pada suatu batas titik waktu. Hukum-hukum atau aturan-aturan konvensional yang didasarkan atas prinsip-prinsip demikian harus diikuti. Prinsip-prinsip yang diterima seseorang pada tahap ini tidak diterima secara sederhana karena persetujuan sosial mereka; melainkan lebih pada prinsip-prinsip mereka ke masyarakat dan diperoleh pemahaman-pemahaman dasar dari keadilan : kesamaan dari hak-hak manusia dan penggambaran sikap menghargai untuk martabat individual setiap orang. Pemikir-pemikir tahap 6 tidak akan pernah memaafkan penggunaan human being sebagai suatu akhir ketidakadilan; melainkan hidup mesti dihargai

sebagai akhir di dalam banyak cara sama seperti pemikir-pemikir tahap 5, tetapi berat lebih besar pada menghargai hidup dan kepribadian individu. Pada pemikir tahap 6 faktor kritis di dalam memutuskan apa adanya secara moral lebih panjang. Tentang ini, konsepsi pada tahap 5 adalah berkaitan dengan kegunaan sosial – kebaikan paling besar untuk jumlah yang paling besar. Tetapi pada pemikir tahap 6 mengandung pertimbangan dari sebuah prinsip moral yang komprehensif, logis, konsisten, dan universal. Disini, dalam dibimbing oleh cara-cara kesadaran seseorang. Ini suatu cara pertimbangan yang otonom, individu harus menentukan apakah suatu tindakan adalah serangkaian pilihan sendiri yang secara universal dapat diterapkan keyakinan-keyakinan yang menunjukkan keadilan.

Pemikir-pemikir tahap 6 mencari keadilan melalui suatu penghargaan kepada kualitas unit dan hak-hak individu.

Pada akhir rincian tentang tingkatan dan tahapan moral judgment disimpulkan bahwa tingkatan moral judgment terdiri atas tingkat pre-conventional, dan post-conventional. Masing-masing tingkat terdiri atas dua tahap sehingga ada enam tahap moralitas heteronomous; kedua, tahap individualisme, tujuan instrumental dan pertukaran; ketiga, tahap harapan interpersonal bersama, hubungan-hubungan, dan konformitas interpersonal;

keempat, tahap sistem sosial dan hati nurani; kelima, tahap kontrak sosial atau kegunaan dan hak-hak individu; dan tahap keenam, tahap prinsip etik universal.

3. Percampuran (Tumpang Tindih), Regresi, dan Fiksasi Dalam Tahap Moral Judgment

Pada periode remaja terjadi perkembangan moral yang pesat, sehingga sering ditemukan adanya tumpang tindih (overlapping) atau percampuran (mixture) tahap moral judgment. Dalam gambaran keadaan seperti ini tahap yang diakui adalah yang dominan. Misalnya moral judgment seorang remaja yang sering muncul adalah pada tahap 3 dan, dan moral judgment lain yang kadang-kadang muncul adalah tahap 2 dan 4. Maka remaja ini tergolong memiliki moral judgment tahap 3.

Secara struktural moral judgment tidak mengalami regresi. Keadaan yang memperlihatkan individu menggunakan tahap moral judgment yang lebih rendah, hal ini merupakan gejala bahwa ia belum mampu meninggalkan sepenuhnya tahap moral judgment yang lebih rendah tersebut. Artinya ia masih dikontaminasi oleh tahap moral judgment yang lebih rendah dari tahap yang sedang diraihnya.

Terhambat atau terhentinya perkembangan (fiksasi) moral judgment dapat terjadi karena terbatasnya potensi, kurang berkembangnya kemampuan berpikir umum, dan kurangnya stimulasi pengembangan moral judgment.

Pada akhir penjelasan sub pokok bahasan ini disimpulkan bahwa jika terjadi overlapping atau mixture, maka yang diakui adalah tahap yang dominan muncul. Regresi tahap sesungguhnya tidak ada, melainkan adanya kontaminasi tahap yang lebih rendah pada tahap yang lebih tinggi. Dan fiksasi terjadi karena terbatasnya potensi serta kurangnya stimulasi lingkungan.

4. Proses Peningkatan Moral Judgment

Perkembangan moral judgment merupakan suatu proses yang berurutan secara tetap, dimulai dari tahap yang rendah menuju ke satu tahap yang lebih tinggi. Tahap satu berkembang ke tahap dua, tahap dua berkembang ke tahap tiga, demikian seterusnya. Tahapan yang lebih tinggi merupakan akumulasi dari tahap-tahap yang lebih rendah dan menggambarkan moral judgment yang lebih kompleks, terdiferensiasi, dan lebih terintegrasi.

Peningkatan moral judgment terjadi melalui proses “interaksi” baik, interaksi sosial secara tatap wajah langsung (face to face) maupun tidak langsung. Melalui tatap wajah langsung peningkatan moral judgment terjadi melalui dialog-dialog dan pemberian umpan balik (feedback), sedangkan secara tidak langsung dapat terjadi melalui pelibatan kognitif, misalnya terhadap kisah cerita dalam majalah, surat kabar, televisi.

Interaksi yang bervariasi mengandung stimulasi pengembangan moral judgment yang tinggi, sementara interaksi yang homogen hanya mengandung stimulasi yang rendah. Variasi dapat dalam hal jenis kelamin, tahap moral judgment, usia, pendidikan, pengalaman, pekerjaan, dan kepribadian.

Dalam situasi interaksi individu akan mengalami alih peran (role taking), karena ia melihat pandangan-pandangan, alasan-alasan yang berbeda-beda antara satu individu dengan individu lainnya dan antara dirinya dengan individu lain. Selanjutnya ia akan merasakan, menyelami dan memahami berbagai pandangan yang ada, membanding-bandingkan (melalui proses analisis sintesis) dalam hal apa dan mengapa terjadi perbedaan. Ia juga akan mengevaluasi dan pada akhirnya akan mengambil kesimpulan-kesimpulan. Menurut Selman (dalam Lickona, 1976) alih peran

berkenaana dengan perubahan kualitatif di dalam struktur pemahaman tentang hubungan perspektif-perspektif orang lain. Ia mengemukakan beberapa pertanyaan yang menunjukkan struktur alih peran berikut “How does the child differentiate the perspective of self and other? How does the child coordinate or relate his perspective to that of an other ? (Lickona, 1976: 301). Pengertian alih peran dapat lebih jelas melalui pertanyaan-pertanyaan “isi” seperti apa pemahaman individu mengenai kemampuan-kemampuan, atribut-atribut, keinginan-keinginan, harapan-harapan, perasaan-perasaan, emosi-emosi, dorongan-dorongan, reaksi-reaksi, dan pemikiran-pemikiran individu lain. Kohlberg mengatakan bahwa “role taking stages describe the level at which the person sees other people, interprets their thoughts and feelings and sees their or place in society” (dalam Lickona, 1976 :32). Dan Arbuthnot dan Faust (1981) menjelaskan bahwa alih peran bukan hanya sekedar mengetahui perasaan-perasaan orang lain atau empati, tetapi lebih dari ini, individu menyadari bahwa ada pandangan-pandangan lain yang berbeda dari pandangannya sendiri. Lebih jauh lagi bahwa alih peran meliputi penerimaan bahwa orang lain mempunyai pandangan mereka sendiri dan memahami hubungan-hubungan yang kompleks antara pandangan-pandangan yang sama atau berbeda.

Pengertian alih peran dalam teori moral Kohlberg tidak sama dengan pengertian empati dan simpati yang umum. Dalam teori perkembangan moral Kohlberg, alih peran dititik beratkan pada unsur kognitif. Unsur emosional menjadi terlibat oleh karena di dalam perilaku ia tidak dapat dipisahkan secara murni. Alih peran dalam pandangan Kohlberg, merupakan suatu unsur yang terorganisir, ia tidak di analisis dari sudut isi, melainkan dari struktur alih peran yang digunakan.

Proses alih peran yang berlangsung pada diri individu merupakan unsur yang paling mendasar untuk terjadinya peningkatan moral judgment. Reimer dan kawan-kawan (1979 : 47) mengatakan bahwa "role taking opportunities stimulate moral development".

Proses alih peran yang berlangsung intens dan kaya dapat menimbulkan elaborasi (pengayaan) yang pada akhirnya dapat meningkatkan moral judgment, walaupun dalam situasi integrasi tidak ada tokoh individu yang lebih tinggi tahap moral judgment, melainkan sama atau lebih rendah. Pada proses elaborasi ini individu akan mempertanyakan mengapa individu A, B, C, dan seterusnya, mempunyai pandangan demikian ? Mengapa mereka berpandangan demikian ? Kemudian individu menelusuri jawaban-jawabannya sehingga menemukan berbagai perspektif,

Pengertian alih peran dalam teori moral Kohlberg tidak sama dengan pengertian empati dan simpati yang umum. Dalam teori perkembangan moral Kohlberg, alih peran dititik beratkan pada unsur kognitif. Unsur emosional menjadi terlibat oleh karena di dalam perilaku ia tidak dapat dipisahkan secara murni. Alih peran dalam pandangan Kohlberg, merupakan suatu unsur yang terorganisir, ia tidak di analisis dari sudut isi, melainkan dari struktur alih peran yang digunakan.

Proses alih peran yang berlangsung pada diri individu merupakan unsur yang paling mendasar untuk terjadinya peningkatan moral judgment. Reimer dan kawan-kawan (1979 : 47) mengatakan bahwa "role taking opportunities stimulate moral development".

Proses alih peran yang berlangsung intens dan kaya dapat menimbulkan elaborasi (pengayaan) yang pada akhirnya dapat meningkatkan moral judgment, walaupun dalam situasi integrasi tidak ada tokoh individu yang lebih tinggi tahap moral judgment, melainkan sama atau lebih rendah. Pada proses elaborasi ini individu akan mempertanyakan mengapa individu A, B, C, dan seterusnya, mempunyai pandangan demikian ? Mengapa mereka berpandangan demikian ? Kemudian individu menelusuri jawaban-jawabannya sehingga menemukan berbagai perspektif,

dan perspektif-perspektif yang beraneka ragam ini akan memunculkan perspektif moral baru dalam diri individu dalam kerangka moral judgment lebih tinggi.

Pada proses alih peran yang kuat kerap menimbulkan pertentangan-pertentangan (conflict) dan pilihan-pilihan (dilema), disebut dengan “konflik sosio-moral kognitif”. Konflik sosio-moral kognitif ini merupakan suatu keadaan tidak seimbang seperti pada situasi teka teki dan rasa ingin tahu bila menghadapi suatu tebakan atau persoalan yang menarik, yang mengundang pemikiran. Bila individu tidak mampu menyelesaikan persoalan tersebut akan menimbulkan perasaan tidak puas, penasaran, bahkan juga frustrasi yang tidak sampai mengganggu emosi. Disini isi berfungsi memperjelas gambaran struktur berpikir yang digunakan seseorang. Kohlberg di dalam bukunya yang berjudul “stages of moral development as a Basic for Moral Edocation” halaman 51 mengemukakan pengertian konflik moral sebagai “a conflict between competing claims of men: you versus me, you versus him” (Boyd, 1976 : 57).

Suatu keadan tidak seimbang (disequilibrium) pada saat individu mengalami konflik dan dilema menimbulkan doronga-dorongan untuk memperoleh keseimbangan (equilibrium) kembali, hal ini diperoleh bila

individu dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi dengan reorganisasi struktural. Turiel (1977 : 635) mengatakan “..... disequilibrium require resolution and a that such resolution comes through structural reorganization”. Bila dalam reorganisasi struktural tersebut individu menggunakan tahap moral judgment yang sama atau lebih rendah, maka moral judgment tidak meningkat. Peningkatan moral judgment hanya terjadi bila individu menggunakan kerangka struktur moral judgment yang lebih tinggi dari struktur moral yang dimilikinya saat itu.

Peran keadaan tidak seimbang (keadaan konflik sosio-moral kognitif) di dalam peningkatan moral judgment, menurut Riegel (1976) dan Ericson (1963) (di dalam Arbuthnot & Faust, 1981) bahwa konflik pada rata-ratanya merupakan dasar untuk pertumbuhan dan perkembangan moral. Arbuthnor & Faust(1981) berpendapat sama bahwa perkembangan moral distimulasi oleh hasil konflik kognitif.

Sesuai dengan paparan tentang peningkatan moral judgment ini,

•]aa&III III,

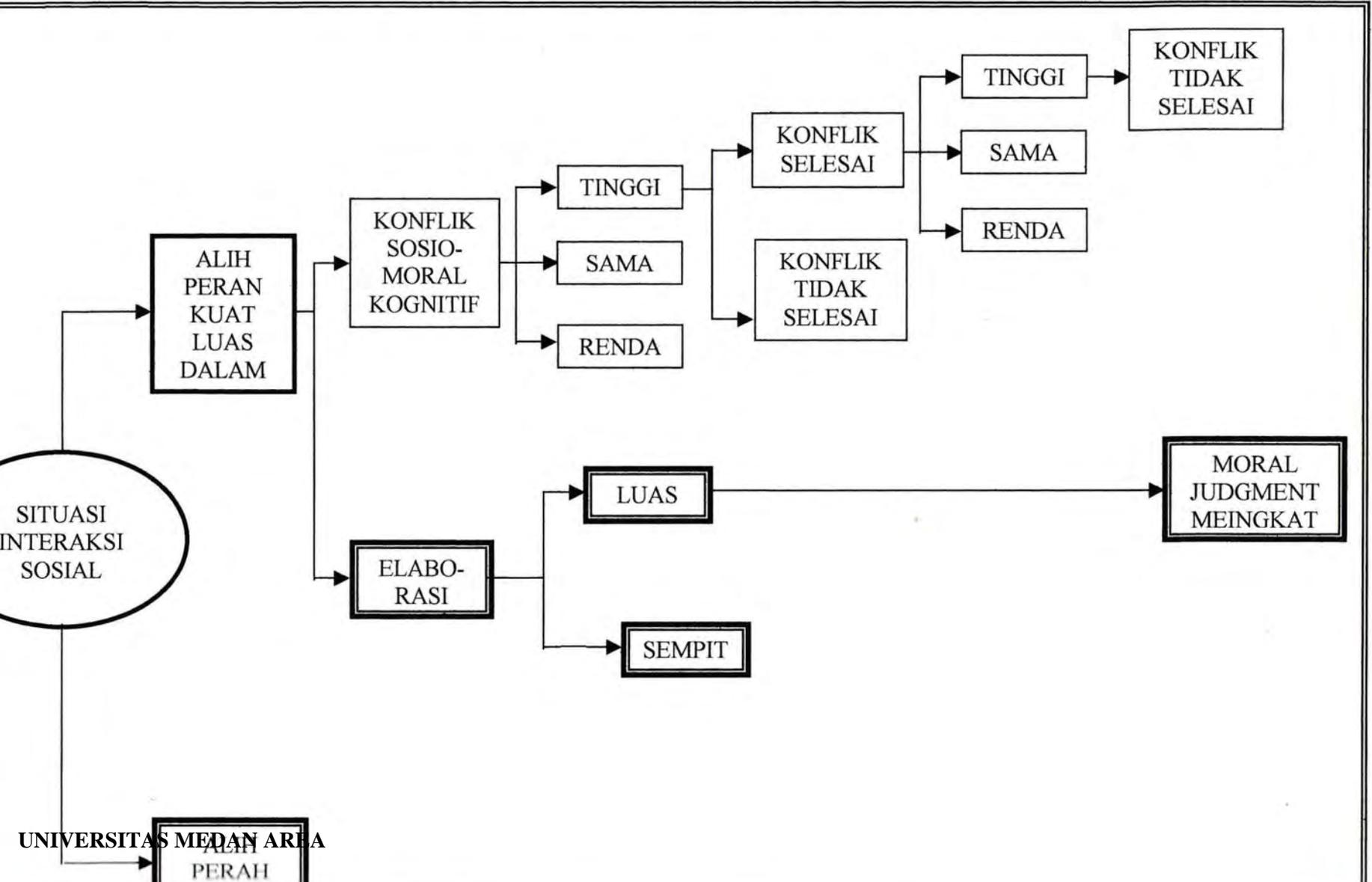
apat disimpulkan bahwa moral judgment meningkat melalui dua tipe
 : tumbuh pengalaman alih peran, kemudian pengalaman alih peran
 mumbuhkan elaborasi yang kuat akan meningkatkan moral judgment.

melalui proses : tumbuhan pengalaman alih peran menimbulkan

konflik sosio-moral kognitif, dan konflik sosial-moral kognitif yang terjadi dapat diselesaikan dengan menggunakan kerangka struktur moral judgment yang lebih tinggi dari tahap moral judgment yang dimiliki oleh individu saat itu.

Peningkatan tahap moral judgment dapat digambarkan dalam skema berikut :

Proses Peningkatan Moral Judgment



eterangan :

) Tipe 1A merupakan peningkatan moral judgment melalui proses elaborasi dari tahap-tahap moral judgment.

Pada tipe ini peningkatan moral judgment diawali oleh tumbuhnya alih peran, kemudian alih peran yang kaya dan mendalam menghasilkan moral judgment yang lebih tinggi dari yang di miliki oleh individu saat itu.

) Tipe 1B merupakan peningkatan moral judgment melalui proses konflik sosio-moral kognitif

Pada tipe ini pengalaman alih peran yang kaya dan mendalam menimbulkan konflik sosio-moral kognitif yang mampu diselesaikan oleh individu mempunyai kemungkinan : menggunakan tahap moral judgment yang lebih tinggi, lebih rendah, atau sama dengan tahap moral judgment yang dimiliki individu. Moral judgment meningkat hanya apabila individu mampu menyelesaikan konflik sosio-moral kognitif dengan menggunakan tahap moral judgment yang lebih tinggi dari yang dimiliki oleh individu saat itu.

Konsepsi Inteligensi Serta Hubungannya Dengan Kemampuan Berfikir Dan moral judgment

Istilah inteligensi digunakan dengan pengertian yang luas dan bervariasi, tidak hanya oleh masyarakat umum, tetapi juga dalam berbagai disiplin ilmu seperti biologi, filsafat, pendidikan dan oleh para psikolog yang berspesialisasi

UNIVERSITAS MEDAN AREA

dalam bidang yang berbeda atau sama dengan orientasi teoritis yang berbeda-beda (Anastasi dan Urbina, 1998).

Piaget merupakan seorang ahli psikologi perkembangan dalam hal perkembangan kognisi (Haditono, 1984). Piaget banyak mengkaji tentang persoalan inteligensi dalam orientasi teori kognitif dengan menggunakan konsep biologi, oleh karena ia juga seorang biolog disamping ahli psikologi.

Kemampuan kognisi sering disebut dengan kemampuan intelektual, kemampuan berfikir, Piaget di dalam bukunya "Piaget's Theory of Intellectual Development" menyebut dengan "intellectual development" di dalam mengemukakan tahapan kemampuan berfikir manusia.

Berkaitan dengan intelegensi, piaget mengemukakan beberapa defenisi intelegensi, yaitu :

".....intelligence is a parti cular instance of biologocal adaptation " (Ginsburg & Opper, 1979 : 13)

"is the form of equilibrium towards which the successive adaptations and exchanges between the organism and his environment are directed" (Ginsburg & Opper, 1979 : 13)

"a system of living and acting operations" (Ginsburg & Opper, 1979: 14).

Defenisi pertama mengemukakan bahwa intelegensi merupakan suatu kemampuan adaptasi biologis manusia. Sistem adaptasi ini berfungsi untuk dapat berinteraksi secara efektif dengan lingkungan pada suatu tingkat psikologis.

Defenisi kedua menunjukkan bahwa intelegensi merupakan bentuk kesimbangan dalam proses adaptasi dan perubahan organisma menghadapi lingkungannya. Defenisi ketiga menunjukkan suatu sistem pikiran dan bertundak yang dilatarbelakangi oleh aktivitas mental yang berstruktur. Dari ketiga defeinisi di atas dapat dilihat bahwa pada akhirnya piaget melibatkan aspek mental (kemampuan intelektual) secara kuat di dalam mendefenisikan intelegensi.

Konsepsi intelegensi dikemukakan secara berbeda-beda sesuai dengan pandangan ahli yang mengemukakannya, demikian pula dengan isi atau unsur yang ada di dalam intelegensi, Surabaya (1990) mengemukakan penggolongan-penggolongan konsepsi inteligensi, sebagai berikut :

1. Konsepsi yang bersifat spekulatif-filsafati
2. Konsepsi yang bersifat pragmatis
3. Konsepsi yang didasarkan atas analisis faktor
4. Konsepsi yang bersifat operasional
5. Konsepsi yang didasarkan atas analisis fungsional

Konsepsi inteligensi yang bersifat spekulatif-filsafati muncul dari ketidakpuasan terhadap penyusunan defenisi yang dibuat sekehendak hati, lalu disusun defenisi inteligensi dalam pendekatan filsafati. Kemudian pragmatis membalik peran, mereka tidak menentukan defenisi dan mengukur melainkan menyusun test dan mengatakan bahwa inteligensi adalah apa yang di ukur oleh test

inteligensi tersebut. Selanjutnya para pengikut teori faktor mempunyai pikiran bahwa langkah pertama adalah menyusun peta atau gambar mengenai organisasi mental dan langkah kedua menyusun test yang murni mengenai kemampuan yang didefinisikan secara obyektif dalam analisis faktor. Ahli-ahli operasional mengajukan keberatan terhadap para pengikut teori faktor ini. Menurut mereka para analisis faktor tidak dapat diterima secara operasional. Konsepsi-konsepsi fungsional menyusun konsepsi inteligensi atau defenisinya. Salah satu teori yang disusun atas dasar seperti ini adalah teori Binet (Suryabrata, 1990).

Spearman menemukan bahwa tingkah laku manusia ditentukan oleh umum faktor g) dan faktor khusus adanya faktor s. Burt berpendapat sama dalam hal bahwa setiap tingkah laku individu mempunyai faktor g dan s, namun Burt menambahkan satu faktor lagi, yaitu faktor kelompok (faktor c). Thurstone berpendapat bahwa yang menentukan hanya faktor c dan s saja. Menurut Thurstone ada 7 faktor c, salah satu diantaranya adalah faktor **penalaran** (reasoning) (Surabaya, 1990). Guilford, sependapat dengan Thurstone, berpendapat bahwa yang pokok dari inteligensi adalah faktor c, tetapi faktor c ini bukan hanya 7 melainkan 120 yang berasal dari tiga dasar, yaitu berdasar atas prosesnya terdiri atas 5 faktor, isinya terdiri atas 4 faktor, dan berdasarkan bentuk informasi yang dihasilkan terdiri atas 6 faktor, sehingga diperoleh $5 \times 4 \times 6 = 120$

faktor inteligensi. Cognition merupakan salah satu faktor inteligensi dari segi prosesnya (Suryabrata, 1990).

Menurut Anastasi dan Urbina (1998), berdasarkan riset ekstensif Thurstone bersama mahasiswa-mahasiswanya. Thurstone mengajukan selusin faktor kelompok yang diberi nama “kemampuan mental primer”. Kemampuan-kemampuan ini paling sering diperteguh oleh para peneliti lain, dan kemampuan-kemampuan tersebut adalah :

- “V Pemahaman Verbal (Verbal Comprehension)
 - W Kelancaran Kata (Word Fluency)
 - N Angka (Number)
 - S Ruang (Space)
 - M Memori Asosiatif (Associative Memory)
 - P Kecepatan Perseptual (Perceptual Speech)
 - I atau R Induksi atau Penalaran Umum (Induction atau General Reading)”
- (Anastasi dan Urbina, 1998 : 232 – 233).

Spearman , Thomson, Burt, Thurstone, dan Guilford adalah ahli yang mendefinisikan inteligensi berdasarkan pendekatan faktor. Sesuai dengan pendapat mereka ini diketahui bahwa salah satu faktor yang ada di dalam inteligensi adalah kemampuan **kognitif**, **penalaran** (reasoning), atau **kemampuan berpikir**. Dengan kata lain, kemampuan berpikir merupakan bagian dari inteligensi.

Kemampuan berfikir (kognisi) dan kognisi sosial merupakan prasyarat perkembangan moral judgment. Haditono (1984 : 256) mengemukakan bahwa Perkembangan kognitif dianggap sebagai salah satu persyaratan yang logis

nutlak bagi perkembangan kognisi sosial, sedangkan perkembangan pengertian norma". Pengertian norma disini dimaksudkan sebagai moral judgment.

Relasional antara kemampuan berpikir (kognisi), kemampuan berpikir sosial (kognisi sosial), dan kemampuan moral judgment (pengertian norma) tersebut dapat dikemukakan dalam bentuk tabel relasi. Sebelum tabel ini disajikan perlu dikemukakan terlebih dahulu bahwa Piaget membagi stadium kemampuan berpikir manusia atas tiga stadium, yaitu stadium berpikir pra-operasional, stadium operasional konkrit dan stadium operasional formal. Sedangkan kemampuan berpikir sosial terdiri atas empat tingkatan, yaitu tingkat egosentrik, tingkat subyektif, tingkat refleksi, tingkat refleksi diri, dan tingkat koordinasi perspektif (Haditono, 1984). Selanjutnya berikut ini disajikan tabel relasi antara kemampuan berpikir, kemampuan berpikir sosial, dan moral judgment.

Tabel II.1

Relasi antara Kemampuan Berpikir (Kognisi), Kemampuan Berpikir Sosial. (Kognisi Sosial), dan Moral Judgment

Stadium perkembangan Kognisi (Piaget)	Tingkat pengambilan peran, perkembangan kognisi sosial (Selman & Byrne)	Stadium penilaian moral (Kohlberg)
Berpikir pra-operasional	Tingkat egosentrik (sekitar 4 tahun) Tingkat subyektif (sekitar 6 tahun)	I. Stadium pra-konvensional 1. Orientasi menurut dan takut hukuman 2. Orientasi hedonistik-instrumental
Berpikir operasional konkrit	Tingkat refleksi diri (sekitar 8 tahun)	II. Stadium konvensional 3. Orientasi saling pengharapan 4. Orientasi pelestarian sistem sosial
Permulaan berpikir operasional formal Menguasai sepenuhnya operasi-operasi formal.	Tingkat koordinasi perspektif (sekitar 10 tahun)	III. Penilaian post-konvensional atau penilaian moral yang prinsip 5. Orientasi kontrak sosial 6. Orientasi pada dasar-dasar moral universal.

(Haditono, 1984 : 256).

Tabel 1 memperlihatkan bahwa stadium berpikir (kognisi) pra-operasional dan tingkat berpikir sosial (kognisi sosial) egosentrik dan subyektik mendasari perkembangan moral judgment stadium pra-konvensional. Stadium berpikir

operasional konkrit dan tingkat berpikir sosial refleksi diri mendasari perkembangan moral judgment stadium konvensional. Stadium operasional normal dan tingkat berpikir sosial koordinasi perspektif mendasari perkembangan moral judgment stadium post-konvensional. Pada stadium post-konvensional ini, moral judgment individu akan terus berkembang mencapai tahap tertinggi sesuai dengan potensinya.

Mengenai hubungan antara inteligensi dengan moral judgment, dari hasil studi-studi yang dilakukan oleh Arbuthnot, 1973, Faust dan Arbuthnot, 1978, Wolstein, 1976, Kohlberg, 1964, 1969, Taylor dan Achenbach, 1975, menemukan korelasi 0.30 sampai dengan 0.55 (Arbuthnot & Faust, 1981). Korelasi-korelasi tersebut menunjukkan bahwa bila skor inteligensi meningkat, maka skor moral judgment cenderung meningkat pula. Penelitian-penelitian tentang inteligensi dan moral judgment masih sulit ditemukan, kemungkinan karena penelitian-penelitian seperti ini masih jarang dilakukan. Namun demikian, dari hasil penelitian tentang korelasi inteligensi dengan moral judgment tersebut dan peran inteligensi sebagai prasyarat perkembangan moral judgment, maka faktor inteligensi ini penting diperhatikan di dalam penelitian-penelitian moral judgment.

Atas paparan pokok bahasan ini diambil kesimpulan bahwa inteligensi diartikan secara luas dan juga berbeda oleh para ahli sesuai dengan kerangka

47

teori yang digunakan oleh mereka masing-masing. Piaget sebagai ahli yang berada pada posisi teori perkembangan kognitif, pada akhirnya melibatkan kemampuan intelektual secara kuat dalam mengartikan inteligensi. Sesuai dengan pendapat Piaget, inteligensi diartikan sebagai suatu sistem pikiran dan bertindak yang dilatar belakangi oleh aktivitas mental yang terstruktur. Inteligensi mempunyai kaitan erat dengan moral judgment, dapat diterangkan sebagai berikut : Inteligensi terdiri atas beberapa unsur, salah satu diantaranya adalah kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir ini merupakan kondisi prasyarat bagi pencapaian moral judgment pada tahap tertentu.

3. Perkembangan Moral Judgment Siswa SMU

Siswa-siswi SMU berada pada usia sekitar 16/17 tahun sampai dengan 20/21 tahun. Melihat usian ini, perkembangan siswa SMU berada oada periode perkembangan remaja. Hurlock (1980) membagi masa remaja atas dua masa, yaitu masa awal remaja yang berlangsung pada usia kira-kira 13 tahun sampai dengan 16/17 tahun dan akhir masa remaja mulai usia 16/17 tahun sampai dengan 18 tahun. Terdapat pendapat yang sedikit berbeda dari para ahli tentang penentuan batas usia remaja. Namun dari banyak pendapat tersebut usia remaja berkisar pada usia 13-21 tahun.

Sesuai dengan usia siswa SMU yang berada pada periode remaja ini, maka membicarakan perkembangan mereka berarti membicarakan perkembangan remaja.

Haditono (1984) berpedapat sama dengan Kohlberg bahwa remaja seyogianya mencapai tingkat perkembangan moral tingkat pasca (post) conventional. Haditono (1984) mendasarkan pencapaian moral judgment remaja pada karakteristik remaja yang masih mau diatur secara ketat oleh hukum-hukum umum yang lebih tinggi, walaupun penilaian-penilaian moral mereka belum berasal dari kata hati yang sungguh-sungguh diinternalisasi. Dengan karakteristik mereka ini maka remaja seharusnya mencapai perkembangan moral tahap lima. Mengenai pendapat Kohlberg, ia mengemukakan dengan tegas bahwa "moralitas pascaconventional harus dicapai selama masa remaja" (Hurlock, 1980 : 225). Berbeda dari pendapat Kohlberg dan Haditono, Watson (1973) berpendapat bahwa moral judgment remaja pada umumnya berada pada tahap 3 dan 4 (tingkat conventional). Dengan pendapat yang berbeda ini, kemungkinan bahwa pencapaian perkembangan moral judgment remaja pada tingkat postconventional tampaknya masih merupakan harapan ideal. Hasil penelitian Kohlberg menunjukkan bahwa hanya 10% remaja Amerika mencapai tingkat ini (tahap lima-penulis) pada usia 16 tahun (Haditono, 1984). Kohlberg mengatakan bahwa "kebanyakan orang tidak mencapai tingkat postconventional, disebabkan

leh pengaruh-pengaruh kultur” (Haditomo, 1984 : 225). Pengaruh kultur disini diartikan sebagai pola asuh orang tua yang berbeda sehingga stimulasi yang terkandung didalamnya berbeda pula. Dalam pola asuh ini ada orang tua yang dominan menggunakan teknik power assertion (penonjolan kekuasaan), love withdrawal (menarik kasih sayang), dan teknik induction (menggunakan pemikiran-pemikiran induktif). Teknik yang membuka peluang besar bagi pengembangan moral judgment adalah teknik induction. Namun secara universal semua kultur walaupun berbeda teknik pola asuh, tetap mempunyai situasi yang dapat mengembangkan moral judgment.

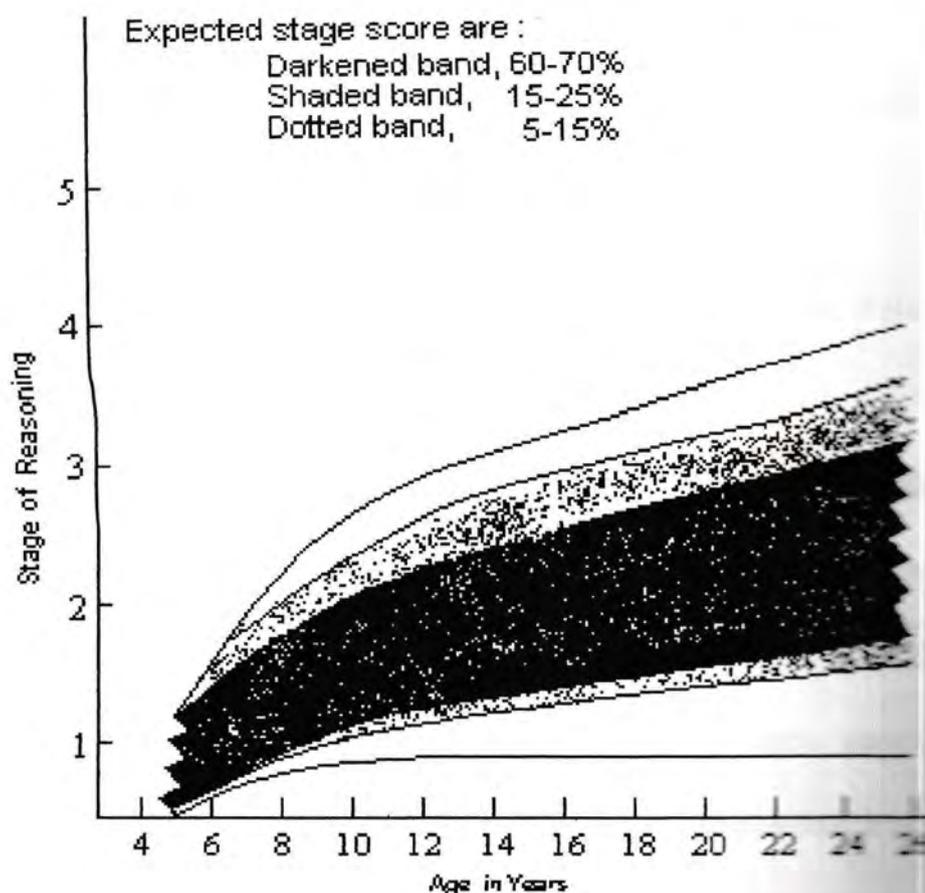
Arbuthnot & Faust (1981) mengemukakan bahwa tidak ada hubungan yang pasti antara usia seseorang dengan tahap moral judgment. Moral judgment individu berkembang dengan kecepatan yang berbeda sehingga pencapaian pada tahap tertentu pada usia berbeda-beda. Walau demikian, ada kecenderungan umum yang sesuai antara perkembangan usia dan tahap moral judgment. Berdasarkan pada data normatif yang dibawa dari sampel orang-orang Kanada dan Amerika, gambar berikut menghasilkan suatu perkiraan yang masuk akal tentang tahap-tahap yang dominan pada usia yang berbeda (Arbuthnot, 1973, 1975a, b; Arbuthnot & Andrasik, 1973; Colby, et al, 1979b; Faust & Arbuthnot, 1978; Goldman & Arbuthnot, 1979; Haan, Smith, & Block, 1968; Kohlberg,

1963; Kohlberg & Kramer, 1969; Sullivan, 1975; Sparling, Arbuthnot, Faust & Key, 1978).

Berikut ini ditampilkan gambar yang memperlihatkan kecenderungan umum hubungan antara usia dan tahap moral reasoning (moral judgment).

Gambar II.1

Norma-Norma Usia dari Tahap Moral Judgment



(Arbuthnot & Faust, 1981 : 87).

Figur (gambar) tersebut merupakan ringkasan gambaran umum untuk semua kelas sosial, sex, tingkat-tingkat pendidikan, dan sebagainya. Hal yang sangat penting

diperoleh dari figur tersebut adalah bahwa perkembangan akan menjadi lebih cepat bersamaan dengan kelas sosial, pendidikan, dan inteligensi yang makin tinggi. Figur ini hanya merupakan suatu bimbingan umum untuk harapan atau norma tentang hubungan antara usia dan tahap.

Dari pemaparan tentang perkembangan moral judgment siswa SMU (remaja) di atas dapat disimpulkan bahwa bagian terbesar remaja menduduki tingkat conventional, walaupun sesungguhnya mereka diharapkan dapat mencapai tingkat postconventional tahap lima (kontrak sosial atau kegunaan dan hak-hak individu).

4. Peran Sebagai Siswa Unggulan Dan Non Unggulan Serta Peluang Dalam Perkembangan Moral Judgment.

Peluang perkembangan moral judgment individu tergantung kepada sejauhmana potensi-potensi tertentu yang dimiliki oleh individu serta kemampuan berpikir, inteligensi, dan faktor-faktor psikologis internal dan minat dan motivasi melakukan berbagai interaksi sosial; serta (status peran yang disandang, yang dapat membatasi atau memperluas kesempatan interaksi. Faktor eksternal (lingkungan) berupa pemberian stimulasi-stimulasi, merupakan peluang yang kaya untuk mengoptimalkan moral judgment. Lingkungan ini meliputi lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Peran dapat mempengaruhi perkembangan moral judgment karena adanya wewenang sekaligus tuntutan tanggung jawab yang dikandung oleh pesan tersebut. Kerap terjadi wewenang dan tuntutan dan tanggung jawab membatasi interaksi sosial individu sehingga peluang pengembangan moral judgmentnya lebih terbatas atau terjadi sebaliknya.

Konsep peran pada awalnya diambil dari kalangan drama atau teater yang hidup subur di zaman Yunani Kuno atau Romawi. Dari dunia ini, makna peran menunjuk kepada karakterisasi yang disandang, dibawakan oleh seorang aktor (tokoh) dalam sebuah pentas drama (Suhardono, 1994). Definisi peran yang paling umum disepakati menurut Suhardono (1994 : 7) adalah “seperangkat batasan, yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi”.

Konsep peran selalu dikaitkan dengan posisi (istilah posisi sering dijelaskan dengan istilah lain seperti niche, status, dan office). Posisi pada dasarnya adalah “unit dari struktur sosial” (Yinger, dalam Suhardono (1994: 14). “Suatu posisi adalah kedudukan yang termasuk dalam sistim hubungan sosial, atau dapat juga merupakan status dalam sistim masyarakat” (Mar’at, 1988 : 8). Posisi tak lain adalah suatu kategori secara kolektif tentang orang-orang yang menjadi dasar bagi orang lain dalam memberikan sebutan, perilaku, atau reaksi umum terhadapnya” (Banton, M, dalam Suhardono, 1994 : 15). Contoh posisi

61

berdasarkan kesamaan perilaku seperti pemimpin, pengikut, kaum lesbian. Berdasarkan bagaimana orang lain memberi perlakuan terhadap seseorang misalnya kambing hitam, pecundang, unggulan non unggulan.

Berkaitan dengan penelitian ini, kategori siswa unggulan dan non unggulan adalah merupakan suatu bentuk “posisi” yang dikategorikan berdasarkan atas perlakuan yang mesti diberi oleh siswa unggulan-non unggulan tersebut atau yang dituntut dari mereka. Dengan kata lain, posisi sebagai siswa unggulan-non unggulan membawa “peran”. Yakni berupa seperangkat patokan perilaku yang harus ditampilkan oleh siswa tersebut.

Suatu posisi mempunyai dimensi tematik (yaitu batas kemampuan seseorang dalam menjalankan tugas); dan dimensi latent (yaitu batas dapat melakukan tugas). Jika “harapan melewati batas tematik maka timbul kesulitan” (Mar’at, 1988 : 9).

Menduduki suatu posisi dapat menimbulkan tekanan dan tengangan (Suhardono, 1994). Tekanan dirasakan pada saat individu merasa sulit memenuhi kewajiban peranannya. Sebagai contoh, siswa unggulan dapat mengalami tekanan karena harus membawakan perannya sebagai siswa unggulan, tidak hanya di sekolah, melainkan juga di rumah dan di kelompok masyarakat yang lebih luas.

Peranan sebagai siswa unggulan berbeda dari peranan siswa non unggulan (siswa reguler). Siswa unggulan mempunyai sisi tuntutan peran yang kerap dipersepsi dan dirasakan sebagai suatu kesulitan (mengandung tekanan dan beban), disamping kebahagiaan. Tuntutan peran yang dipersepsi sebagai suatu kesulitan adalah : a. Mempertahankan prestasi belajar tinggi, b. Menjadi contoh (model), c. Mempunyai kemampuan yang tinggi diluar prestasi belajar seperti kemampuan mengatasi masalah diri sendiri maupun masalah orang lain, d. Menjadi utusan sekolah dalam berbagai kegiatan di luar sekolah. Tuntutan peran ini membuat siswaunggulan merasa khawatir dan cemas jika ia tidak dapat mempertahankan prestasi belajarnya, sehingga terpaksa harus menyediakan waktu belajar yang lebih banyak, meskipun merasa bosan, jenuh, lelah, kekurangan waktu untuk bermain, bercanda, bersosialisasi dengan individu yang beragam, merasa kurang bebas berperilaku sebagai remaja yang kadang kala ingin menggoda (menggangu) orang lain.

Menurut Suhardono (1994)jika tekanan-tekanan belum dapat dipenuhi penyelesaiannya, maka akan muncul dua kemungkinan. Pertama, perilaku kan memenuhinya secara lugas; atau kedua, memenuhi secara artifisial (perilaku dibuat-buat). Kemungkinan reaksi mana yang muncul pada siswa, hal ini masih dapat lebih membatasi kesempatan siswa-siswa unggulan dalam pengembangan moral judgmentnya. Waktu mereka lebih sedikit dialokasikan untuk berbagai

kegiatan yang sifatnya mengembangkan moral judgment, baik dalam kegiatan-kegiatan interaksi tatap muka langsung maupun melalui berbagai sarana pengganti seperti membaca kisah-kisah cerita sosial-moral dari berbagai sumber. Pada umumnya, dalam kegiatan sehari-hari mereka mengisi waktunya dengan kegiatan belajar tentang pelajaran-pelajaran di sekolah dan menambahnya dengan kursus-kursus pengetahuan diluar sekolah. Mereka hanya terlibat sekedarnya dalam pembicaraan-pembicaraan masalah-masalah sosial-moral. Sementara pembicaraan-pembicaraan seperti ini dibutuhkan untuk terjadinya situasi penerimaan dan pemberian balikan (feedback), yang memunculkan pengalaman-penalaman alih peran dan dilema-dilema, sehingga terjadi peningkatan moral judgment.

Jika siswa-siswa unggulan yang mempunyai peluang lebih terbatas dalam pengembangan moral judgment, maka sebaliknya dengan siswa-siswa non unggulan. Para siswa non unggulan tidak dibebani oleh kecemasan akan turun ke kelas non unggulan, sehingga mereka secara psikologis merasa lebih nyaman dalam menjalani studinya. Mereka lebih mempunyai banyak waktu dan lebih bebas mendistribusikan waktunya untuk belajar atau melakukan berbagai kegiatan sosial yang akan mengembangkan moral judgment mereka. Dengan demikian, bila potensi perkembangan moral judgment siswa unggulan dan siswa

non unggulan relatif sama, maka dapat terjadi perkembangan moral judgment siswa non unggulan lebih baik dari siswa unggulan.

Dengan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa siswa unggulan dan non unggulan merupakan suatu posisi yang membawa berupa seperangkat patokan perilaku yang harus dilakukan. Suatu peran dapat dipersepsi atau dirasakan sebagai suatu tekanan pada saat individu merasa kesulitan memerankan perannya dan sebaliknya akan membawa kebahagiaan apabila individu dapat memerankan dengan baik. Peran sebagai siswa unggulan mengandung self esteem lebih positif, namun di sisi lain mengandung tekanan peran yang cukup kuat sehingga kerap kali membatasi peluang perkembangan moral judgment. Sebaliknya dengan siswa yang berperan sebagai siswa non unggulan, mereka tidak dibebani oleh tuntutan peran yang berat sehingga secara psikologis merasa lebih nyaman, rileks dan lebih mempunyai kesempatan waktu untuk berkembangnya moral judgment. Dengan demikian, apabila secara potensial moral judgment siswa non unggulan relatif sama dengan siswa unggulan, dan siswa non unggulan mempunyai minat yang cukup kuat untuk berinteraksi secara sosial-moral, maka siswa non unggulan mempunyai peluang lebih besar dalam pengembangan moral judgment.

